



## **Model Politik Pembangunan Organisasi Kemasyarakatan Islam Muhammadiyah dan Al Washliyah di Kota Medan**

### ***Political Model of Development of Muhammadiyah and Al Washliyah Islamic Community Organizations in Medan City***

**Heri Kusmanto\* & Warjio**

Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima November 2018; Disetujui Desember 2018; Dipublikasikan Desember 2018

#### **Abstrak**

Penelitian ini membahas model politik pembangunan organisasi kemasyarakatan Islam yakni Muhammadiyah dan Al-Washliyah di Kota Medan. Secara spesifik penelitian ini menjelaskan tentang politik pembangunan organisasi kemasyarakatan Islam (Muhammadiyah dan Al-Washliyah) dalam mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya dalam aktivitas pembangunan di Kota Medan. Konteks penelitian yang dilakukan terutama menyangkut orientasi kedua organisasi kemasyarakatan Islam yang dikenal memiliki aliran pemikiran berbeda satu sama lain, Muhammadiyah mewakili pemikiran modern sedangkan Al-Washliyah mewakili kalangan tradisional dalam rangka keterlibatan aktivitas pembangunan mereka di Kota Medan. Penelitian ini mengkaji bentuk bentuk atau model maupun strategi pembangunan, serta arah ataupun orientasi yang menjadi dasar kebijakan politik pembangunan Muhammadiyah dan Al-Washliyah di Kota Medan yang tentunya masing masing akan memiliki perbedaan karena dasar aliran pemikiran yang berbeda. Selain itu tentunya pengembangan arah ataupun orientasi yang membentuk model politik pembangunan juga akan memiliki sistem ataupun cara yang berbeda dengan yang selama ini dikembangkan oleh kalangan pemerintahan yang cenderung pembangunan dengan pendekatan sekular yang saat dirasakan telah mensejaterakan masyarakat disatu sisi tapi di sisi lain telah menimbulkan paradoks seperti kemiskinan, ketimpangan dan degradasi moral.

**Kata kunci:** Politik Pembangunan, Organisasi Kemasyarakatan Islam, Muhammadiyah dan Al-Washliyah.

#### **Abstract**

*This study discusses the political model of development of Islamic community organizations namely Muhammadiyah and Al-Washliyah in Medan City. Specifically, this study describes the politics of development of Islamic community organizations (Muhammadiyah and Al-Washliyah) in maintaining and developing their existence in development activities in Medan City. The context of the research carried out mainly concerns the orientation of the two Islamic community organizations which are known to have different schools of thought from each other, Muhammadiyah represents modern thought while Al-Washliyah represents traditional circles in the context of their development activities in Medan City. This study examines the form or model and strategy of development, as well as the direction or orientation that forms the basis of Muhammadiyah and Al-Washliyah's political development policies in Medan City, which of course will have differences because of the different schools of thought. In addition, of course, the development of directions or orientations that shape the political model of development will also have a system or a different way from what has been developed by the government which tends to develop with a secular approach that is felt to have a community side on one side poverty, inequality and moral degradation.*

**Keywords:** Politics of Development, Islamic Community Organizations, Muhammadiyah and Al-Washliyah.

**How to Cite:** Kusmanto, H. & Warjio. (2018). Model Politik Pembangunan Organisasi Kemasyarakatan Islam Muhammadiyah dan Al Washliyah di Kota Medan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 6 (2): 142-155.

\*Corresponding author:

E-mail: [herikusmanto@usu.ac.id](mailto:herikusmanto@usu.ac.id)

## PENDAHULUAN

Politik Pembangunan memiliki peran yang strategis dalam menentukan orientasi kemajuan suatu masyarakat. Politik pembangunan pada dasarnya merupakan arah atau orientasi terhadap pilihan-pilihan pembangunan, berupa ideologi, aktor, pendekatan, sistem atau cara, strategi atau model yang dikembangkan dalam pembangunan (Kusmanto, 2012; Warjio, 2016). Politik pembangunan yang selama ini dilakukan telah menimbulkan banyak paradoks dalam kehidupan masyarakat seperti semakin besarnya jumlah orang miskin, meningkatnya kriminalitas dan penggunaan narkoba, kerusakan lingkungan, semakin besarnya hutang negara dan terjadinya degradasi moral serta kehidupan (Budiman, 2000; Dimsky, 2010; Warjio, 2016). Arah atau orientasi pembangunan yang bersifat sekular dan kapitalistik, serta materialistik telah menimbulkan banyak masalah saat ini dan mengancam kelangsungan kehidupan di bumi, secara khusus di kota Medan, kita dapat melihat dan merasakan paradoks pembangunan telah terjadi. Oleh karena itu diperlukan suatu pengkajian tentang model politik pembangunan sebagai alternatif yang dapat menjadi suatu model yang inovatif yang telah dirintis oleh kalangan organisasi kemasyarakatan Islam. Penelitian ini akan membahas model politik pembangunan dan peran atau fungsi aktor serta strategi Organisasi kemasyarakatan Islam yakni Muhammadiyah dan Al-Washliyah di Kota Medan. Pada awalnya penelitian ini menjelaskan tentang perbedaan aliran pemikiran Islam yang mereka kembangkan sebagai arah atau orientasi, strategi dan model politik pembangunan yang mereka (Muhammadiyah dan Al-Washliyah) kembangkan dalam rangka mewujudkan peran dan pengembangan eksistensinya di Kota Medan. Agenda maupun strategi bentuk-bentuk keterlibatan mereka dalam aktivitas politik pembangunan di Kota

Medan juga menjadi kajian penelitian ini. Tentunya penelitian ini juga melihat dari beberapa kajian penting terdahulu yang pernah dilakukan oleh Heri Kusmanto dkk 2015 dengan topik: politik pembangunan hotel syariah di Indonesia: model, tantangan dan peluang. Hasil kajian menunjukkan bahwa politik pembangunan hotel syariah yang dikembangkan oleh pengusaha swasta untuk menjalankan bisnis perhotelan dengan pendekatan Islam atau dikenal sebagai konsep hotel syariah ternyata memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan di Indonesia, khususnya di Jakarta, karena ternyata kebudayaan Islam telah berkembang sejalan dengan perkembangan jumlah kelas menengah Muslim di Indonesia.

Selanjutnya penelitian lainnya yang menunjukkan bahwa konsep syariah di negara-negara yang mayoritasnya Muslim ternyata memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh haji Mahmud bin haji Mohamed mengenai hotel syariah di Brunei disebutkan bahwa perubahan sosial politik dalam tingkat global menjadi salah satu faktor dari semakin kuatnya atau berkembangnya hotel syariah di dunia khususnya dinegara-negara anggota *organization of Islamic countries* (OIC). Dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perkembangan hotel syariah di Brunei dapat tumbuh dan berkembang karena tidak hanya konsumen Muslim yang menerima konsep tersebut, namun juga karena konsumen dari kalangan lain merasa pelayanan yang dilakukan memang memuaskan. Selain itu, faktor dukungan dari kerajaan khususnya terkait dengan kebijakan pengembangan nilai-nilai Islam dalam praktek kehidupan sehari-hari dilakukan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Heri Kusmanto (2013) tentang politik pembangunan masyarakat sipil berteraskan Islam Indonesia menyimpulkan bahwa orientasi perspektif Islam menjadi basis ideologis yang

mendorong masyarakat sipil Islam menjalankan dakwah secara komprehensif dalam membina masyarakat sebagai upaya mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya telah berkembang dengan pesat dan bahkan memiliki peran dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia.

Realitas Islam memiliki peran dalam memberi bentuk perubahan masyarakat menjadi latar belakang penelitian ini, khususnya tentang politik pembangunan Islam yang memiliki perbedaan dengan politik pembangunan konvensional yang hanya menekankan aspek pencapaian keberhasilan yang bersifat kapitalistik dan materialistik saja, sehingga banyak menimbulkan paradoks, sedangkan perspektif Islam memiliki pendekatan yang lebih komprehensif untuk mencapai kehidupan yang lebih baik tidak hanya di alam dunia saja, melainkan di alam akhirat yang akan menjadi masa depan manusia yang sesungguhnya. Selain itu, selama ini analisis pembangunan pada umumnya diletakkan dalam sudut pandang yang sempit yaitu dari sudut ekonomi, sehingga hampir pasti meniadakan peran para aktor politik yang memiliki orientasi atau kepentingan tertentu yang berpengaruh terhadap pilihan-pilihan pembangunan yang dilaksanakannya. Oleh karena itu, perspektif politik pembangunan keberadaannya diperlukan agar penggambaran dan analisis tentang pembangunan tidak menjadi dangkal, karena hanya melihat proses-proses ekonomi saja.

Secara akademik dominasi perspektif ekonomi dalam pembangunan tentu saja menyebabkan analisis pembangunan dari perspektif politik menjadi mandek, tidak berkembang. Padahal kalau mau jujur, pembangunan merupakan produk politik. Tidak ada pembangunan tanpa ada proses-proses politik. Sebab proses politik inilah yang melahirkan produk politik yaitu pembangunan (Warjio, 2016).

Muhammadiyah dan Al-Washliyah merupakan organisasi Islam terbesar di Kota Medan. Secara politis tentu kehadirannya memiliki peran yang begitu besar bagi politik pembangunan di Kota Medan. Muhammadiyah dan Al-Washliyah pada era reorganisasi kemasyarakatan telah menunjukkan peran politik penting dengan menunjukkan keberanian yang signifikan seiring dengan arus besar keinginan masyarakat untuk melakukan reorganisasi kemasyarakatan (Kusmanto, 2013). Disinilah terjadi pematangan peran organisasi kemasyarakatan Islam dan keterlibatannya dalam pembangunan pada aspek politik. Selain itu gelombang demokratisasi yang mempengaruhi politik pembangunan, memberi ruang kesertaan masyarakat atau *civil society* dalam segala aspek kehidupan.

Keberadaan Muhammadiyah dan Al-Washliyah sebagai *civil society* atau organisasi kemasyarakatan yang berbasis Islam memiliki peran dalam mengembangkan pembinaan bidang keagamaan, sosial, ekonomi dan pendidikan yang patut diapresiasi. Mereka juga memiliki peran politik dan bersikap kritis terhadap perkembangan dinamika politik yang terjadi, baik lokal maupun lingkup nasional. Sebagai organisasi masyarakat atau *civil society* Muhammadiyah dan Al-Washliyah telah menjalankan fungsi politiknya sejak masa kolonial di Indonesia. Muhammadiyah dan Al-Washliyah telah berkiprah dalam pergerakan kebangkitan kebangsaan, sehingga bangsa ini merdeka, serta telah berperan dalam meletakkan fondasi Negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, serta pembangunan bangsa. Pada masa reorganisasi kemasyarakatanpun mereka menjadi bagian yang penting dalam mendorong proses demokratisasi yang memberi peluang kebebasan terhadap ekspresi kehidupan yang Islami (Kusmanto, 2013)

Politik akomodasi merupakan strategi yang ditempuh dalam partisipasi

politik Muhammadiyah dan Al-Washliyah, pada satu sisi sejak kelahirannya tidak memiliki hubungan organisatoris dengan organisasi atau partai politik, dan secara konsisten berkiprah dalam ranah dakwah, namun disisi lain, kalangan elite mereka atau para kader mereka ikut aktif dalam berpolitik melalui berbagai partai politik dan bahkan pada masa reorganisasi kemasyarakatan ini para kader secara aktif mendirikan partai-partai yang berkarakter Islam (Kusmanto, 2013).

Kehadiran Muhammadiyah dan Al-Washliyah di Sumatera Utara tepatnya di Kota Medan telah banyak memberikan dalam pembangunan, khususnya dalam bidang dakwah, pendidikan/tarbiyah, amal usaha ekonomi dalam bentuk pendirian koperasi atau berbagai amal usaha lainnya seperti percetakan, amal usaha pengembangan kesehatan masyarakat seperti klinik kesehatan bahkan pembangunan rumah sakit yang besar, dan sebagainya. Saat ini yang paling menonjol adalah dibidang pendidikan, sehingga perlu lebih digalakkan lagi amal usaha di bidang ekonomi agar masyarakat dapat lebih sejahtera, karena masih banyak masyarakat miskin yang tidak dapat dijangkau oleh pemerintahan, selain jeratan kehidupan yang ribawi dan sangat tidak Islami.

Keadaan ini menunjukkan bahwa kontribusi Muhammadiyah dan Al-Washliyah dalam kemaslahatan masyarakat sudah tidak diragukan lagi. Keberhasilan Muhammadiyah dan Al-Washliyah dalam mengembangkan keberadaannya sehingga banyak kebaikan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat perlu untuk dikaji, khususnya menyangkut politik pembangunan yang mereka lakukan, meliputi arah atau orientasi, peran aktor, strategi dan model yang dikembangkan sehingga akan menjadi model alternatif yang dapat diapakai oleh kalangan pemerintahan untuk mengurangi dampak pembangunan yang hanya bersifat kapitalistik dan materialistik saja yang

telah menimbulkan paradoks saat ini dan telah mengancam keberlanjutan kehidupan manusia.

Setidaknya ada tiga arti penting dan menariknya penelitian ini dilakukan yang dianggap terbarukan berkaitan dengan politik pembangunan organisasi kemasyarakatan Islam yakni Muhammadiyah dan Al-Washliyah di Kota Medan diantaranya, *pertama* pembangunan sebagai satu fenomena bukanlah proses teknokratis dan birokratis saja. Atau pembangunan tidak hanya dijelaskan dari perspektif ekonomi saja. Sebaliknya pembangunan tidak bisa dipisahkan dari relasi kekuasaan dan politik. Politik pembangunan juga dapat dilakukan oleh masyarakat atau organisasi kemasyarakatan. Dalam konteks modern, demokrasi memberikan ruang yang cukup besar kepada organisasi kemasyarakatan untuk terlibat aktif dalam pembangunan. *Kedua*, melalui penelitian politik pembangunan organisasi kemasyarakatan dapat mengetahui peran aktor dalam proses pembangunan yang dijalankan. Pendekatan aktor dalam politik pembangunan secara spesifik bisa individu ataupun lembaga. *Ketiga*, melalui politik pembangunan organisasi kemasyarakatan kita dapat mengetahui sistem serta ideologi yang dikembangkan atau dijadikan dasar dalam politik pembangunan. Hal ini terlihat bagaimana proses dan strategi politik pembangunan yang dijalankan oleh aktor-aktor pembangunan tersebut.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan dan metode kualitatif deskriptif. Secara teoritis penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang memberikan penekanan pada data yang dihasilkan berupa data deskriptif, yakni kata-kata tertulis ataupun lisan dari objek atau orang yang diamati (Moleong, 2012).

Penelitian ini akan mengungkap data secara kualitatif agar kita mengetahui politik pembangunan organisasi kemasyarakatan Islam Muhammadiyah dan Al-Washliyah berkaitan dengan arah atau orientasi, strategi, model dan peran aktor politik pembangunan yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan Al-Washliyah.

Kegiatan penelitian dilaksanakan di institusi organisasi Muhammadiyah dan Al-Washliyah Kota Medan Sumatera Utara.

Pengumpulan data merupakan suatu proses yang penting dalam sebuah penelitian. Berbagai macam metode dan teknik penelitian kualitatif telah dikembangkan dalam proses pengumpulan data. Namun penelitian ini akan fokus pada metode observasi, wawancara, dan studi pustaka atau dokumentasi, serta melakukan *forum group discussion (FGD)*, kegiatan *FGD* dilakukan untuk menguji ulang kebenaran data subyektif hasil dari kegiatan wawancara dan observasi serta temuan-temuan pada studi pustaka atau dokumentasi di lingkungan kelembagaan organisasi kemasyarakatan Islam Muhammadiyah dan al-Washliyah. Wawancara dan *FGD* dilakukan tidak hanya untuk menggali inforganisasi kemasyarakatan tetapi juga menemukan inforganisasi kemasyarakatan baru yang diungkapkan oleh informan untuk dianalisis secara mendalam pada proses penelitian ini.

Kegiatan observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti guna mencegah kekeliruan dalam pengumpulan data yang seringkali terjadi, misalnya terutama pada kegiatan wawancara, sehingga dapat berakibat terjadinya kesalahan dalam menginterpretasi data (Arikunto, 2002). Hal ini disebabkan peneliti tidak langsung berperan sebagai pengumpul data, sehingga terjadi kesalahan dan untuk semakin meningkatkan kebenaran data maka kegiatan *FGD* dilakukan dengan mengundang berbagai informan penelitian yang menjadi kunci dari inforganisasi kemasyarakatan tentang politik

pembangunan Muhammadiyah dan Al-Washliyah.

Instrumen penelitian adalah perlengkapan dan peralatan yang akan dipergunakan peneliti untuk menunjang pelaksanaan penelitian. Selain membutuhkan peralatan sebagai instrumen penelitian, pada penelitian kualitatif peneliti sendiri merupakan instrumen dalam meneliti (Moleong, 2012). Pedoman wawancara, dapat berupa *interview* ataupun kuisisioner, dan dibuat dengan terstruktur dan tertulis untuk memudahkan menggali inforganisasi kemasyarakatan dari informan sehingga proses wawancara dapat menemukan inti dari rumusan masalah dalam penelitian (Putra, 2013). Alat bantu berupa perekam yang dipergunakan untuk mendokumentasikan hasil wawancara. Selain alat perekam juga dilengkapi dengan alat-alat tulis untuk mencatat hasil observasi lapangan. Alat bantu lainnya berupa kamera sebagai perekam dokumentasi fisik berupa foto dan perekam suara (Putra, 2013). Selain itu diperlukan seperangkat komputer yang dipergunakan untuk pembuatan laporan, *editing* gambar/peta dan analisis data.

Dalam pengolahan data, peneliti menggunakan beberapa tahap sebagai berikut: Tahapan Deskripsi Data, Pada tahapan ini, data yang telah dikumpulkan dideskripsikan sesuai dengan data dan selanjutnya dilakukan tahapan klasifikasi data. Tahapan Analisis Data, Tahap ini merupakan tahapan yang sangat penting karena semua data yang telah diklasifikasikan tersebut kemudian dianalisis berdasarkan pemahaman pada landasan teori. Selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif dari perspektif deskriptif. Melalui pendekatan teori yang telah disebutkan sebelumnya, fenomena-fenomena dan fakta yang ditemukan pada saat observasi dihubungkan dan didialogkan satu persatu. Dengan menghubungkan antar fenomena dengan teori yang ada akan

ditemukan hubungan sebab-akibat. Pada akhirnya akan didapatkan temuan fenomena-fenomena di lapangan yang dapat digolongkan sebagai jawaban Model Politik Pembangunan Organisasi Masyarakat Islam Muhammadiyah dan Al-Washliyah di Kota Medan. Tahapan Evaluasi, Tahap ini merupakan tahapan akhir dari proses analisis data, pada proses ini dilakukan penilaian/evaluasi keseluruhan terhadap semua proses yang telah dilaksanakan. Tahapan ini akan menyajikan deskripsi dan analisis data yang telah dilakukan serta dibuatkan kesimpulan seluruh hasil analisa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Orientasi dan Strategi Politik Pembangunan Muhammadiyah**

Hasil penelusuran sejarah berdirinya Muhammadiyah dan pada umumnya seluruh organisasi kemasyarakatan Islam menunjukkan bahwa pendirian organisasi itu diutamakan untuk dakwah, lantas berkembang menjadi kegiatan tarbiyah atau pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan berbagai kegiatan amal usaha, kegiatan-kegiatan itu berupa koperasi, percetakan atau penerbitan, klinik kesehatan atau ada yang berkembang menjadi rumah sakit. yang dilakukan menunjukkan Pada masa ini Muhammadiyah telah melakukan aktivitas politik.

Arah atau orientasi kepada dakwah ini menjadi aktivitas paling mendasar dari seluruh gerakan organisasi kemasyarakatan Islam, sebagai suatu titik tolak yang ada dalam Muhammadiyah juga. Namun yang membedakan Muhammadiyah dengan organisasi kemasyarakatan Islam lainnya adalah kecenderungannya untuk mengangkat surah atau ayat-ayat tertentu sebagai dasar ideologis dari seluruh aktivitasnya, sehingga surah atau ayat-ayat ini menjadi semacam basis ideologi dari politik pembangunan yang sedang dilakukan.

Basis ideologis itu yang sangat kental mewarnai dakwah Muhammadiyah itu terutama ada dalam surah Ali Imran ayat 104, "Dan hendaklah ada diantara kamu sekelompok umat yang menyeru kepada kebaikan (*al-khair*), menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mencapai kejayaan (*al-falah*). Ayat Al-Qur'an ini menjadi dasar pergerakan Muhammadiyah, sehinggalah organisasi kemasyarakatan ini dikenal sebagai organisasi kemasyarakatan yang mendakwahkan amar ma'ruf nahi munkar.

Arah atau orientasi politik Muhammadiyah menjadi sangat kental dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang ditempuhnya melalui strategi dakwah itu sendiri dengan upaya yang bersifat memurnikan ajaran Islam dari sinkretisme yang sering menimbulkan TBC (*tahayul, bid'ah dan churafat*), selain itu dakwah ditempuh dengan strategi dakwah bil hal, dakwah dengan melakukan sesuatu yang berguna dan memperbaiki masyarakat, seperti membangun banyak lembaga-lembaga pendidikan dengan ciri atau karakter Islam, mendirikan masjid-masjid, koperasi, percetakan, klinik kesehatan, rumah sakit, panti-panti asuhan anak yatim atau kalangan jompo atau yang berusia emas, dan sebagainya.

Surah Ali Imran ayat 104 tersebut menjadi basis utama ideologis dan menjadi dasar strategi pencapaiannya, yakni untuk mendorong masyarakat kepada kebaikan. Kebaikan ini pertama-tama dipahami sebagai suatu gerakan menuju pemurnian praktek beribadah dikalangan masyarakat Muslim yang banyak dicemari oleh TBC. Kedua, sebagai upaya pembaharuan dan pencerahan, untuk mencegah taqlid. Kehidupan masyarakat terus berubah semakin kompleks dan memerlukan pemahaman baru terhadap ajaran Islam, sehingga Muhammadiyah menolak untuk bermazhab. Menurut mereka diperlukan upaya ijtihad secara berkelanjutan agar penafsiran Islam tidak berhenti dan

menjadi mundur tertinggal oleh kemajuan peradaban. Mereka mendirikan majelis Tarjih yang bertugas untuk melakukan ijtihad secara terus menerus yang hasilnya akan disebarluaskan kepada masyarakat sebagai petunjuk kehidupan dan mereka juga menghimpunnya dalam suatu Himpunan Putusan Tarjih (HPT).

Muhammadiyah juga mengembangkan suatu pedoman kepribadian (*syakhsyah*) Muhammadiyah yang dirumuskan melalui muktamar yang ke-35 tahun 1962. Selain itu, pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan, juga menekankan aspek-aspek penting dalam Al-Qur'an yang perlu dipedomani dan dilaksanakan meliputi 14 kelompok surah dan 17 ayat : 1. Al-Jaatsyah, ayat 23; 2. Al-Fajr, ayat 16-23; 3. Al-Maa'un, ayat 1-3; 4. Ar-Rum, ayat 30; 5. At-Taubah, ayat 34-35; 6. Al-Ashr; 7. Al-Ankabut, ayat 2; 8. Az-Zumar, ayat 2 dan Al-Ahzab, ayat 21; 9. Ali Imran, ayat 1-2, dan 92; 10. Al-An'am, ayat 62; 11. Al-Qori'ah, ayat 6-11; 12. Ash-Shaff, ayat 3-4; 13. At-Tahrim, ayat 6 dan 14; 13. Al-Hadiid, ayat 16. (M.Djindar Tamimy, 1990).

Kumpulan surah dan ayat-ayat yang ditekankan itu memiliki perhatian terhadap kepribadian, solidaritas sosial, kesadaran tentang pentingnya waktu, menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak berguna dan tercela, meneladani Rasul Muhammad, berjihad dan bersikap istiqomah untuk kebaikan, kebenaran dan taqwa (Kusmanto, 2013). Kumpulan surah ini juga menjadi basis ideologis yang menjadi arah atau orientasi dari politik pembangunan Muhammadiyah yang mengambil bentuk strategi dakwah, baik dakwah sebagai suatu aktivitas pencerahan maupun pendidikan, juga dakwah bil hal dalam arti melakukan perbuatan yang nyata seperti pengembangan organisasi, pemberdayaan masyarakat dan sebagainya.

### **Orientasi dan Strategi Politik Pembangunan Al Washliyah**

Berbeda dengan basis ideologis Muhammadiyah, maka Al-Washliyah memiliki pandangan sendiri terhadap basis ideologisnya, walaupun mereka sama-sama melakukan dakwah. Al-Washliyah dilahirkan untuk menjadi tempat berkumpulnya orang-orang dengan tujuan mulia, yaitu untuk membuat hubungan baik dengan Allah SWT (*hablumminallah*) dan hubungan baik dengan sesama manusia (*hablumminannas*). Pandangan ini bersumber kepada surah Ali Imran ayat 103 dan 104 (Burhanuddin al-Butary, 2008). Nama Al Jam'iyatul Al Washliyah itu sendiri memiliki makna hubungan, begitu pentingnya hubungan baik itu harus dibina secara vertical maupun horizontal agar dalam perjuangan atau dakwah menegakkan ajaran Islam menjadi lebih kuat dan memiliki pengaruh yang besar.

Selain itu beberapa surah yang menjadi penekanan dan perhatian penting gerakan dakwah Al-Washliyah adalah surah Ash-Shaff, ayat 10-11; An-Nahl, ayat 125; Ar-Rad, ayat 21; Asy-Syuraa, ayat 38; Ali-Imran, ayat 159; An-Nisaa', ayat 59; Al-Qolam, ayat 4; Al-Maun, ayat 1-3; Muhammad, ayat 7; dan Al-Qori'ah ayat 6-9. Kumpulan Surah tersebut memiliki kandungan untuk memperingatkan manusia tentang pentingnya menjaga hubungan baik dengan Allah SWT, berdagang kebaikan dengan Allah SWT atau menolong agama Allah SWT, pentingnya memiliki akhlak yang mulia, solidaritas sosial, prinsip-prinsip tauhid, ibadah dan muamalah.

Pendekatan yang berbeda Al-Washliyah ini menjadi ciri tersendiri dari gerakan ini, sehingga Al-Washliyah dikenal memiliki peran moderasi dalam menghadapi persoalan-persoalan masyarakat. Basis ideologis tersebut menjadi arah atau orientasi politik pembangunan Al-Washliyah dengan strategi dakwah sebagai sarana

pencapaian tujuan-tujuan ideologisnya, yaitu dengan mengembangkan dakwah itu sendiri, pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan mereka itu sendiri, sehingga Al-Washliyah yang tumbuh dari wilayah Medan dapat terus berkembang ke seluruh Indonesia.

Al-Washliyah menjadikan dakwah, pendidikan, dan sosial menjadi potensi perubahan sosial. Penekanan gerakan dakwah merupakan strategi kemasyarakatan yang dipedomani Al-Washliyah merupakan faktor yang penting untuk menjaga keberlangsungan hidup dan nama baik organisasi. Strategi ini berbeda dibandingkan dengan strategi yang dilakukan oleh kalangan Islam formal yang tidak jarang menggunakan cara-cara radikal yang akan membuat citra Islam menjadi buruk, dan sering kali menimbulkan korban nyawa yang seharusnya tidak perlu terjadi. Apalagi cara yang digunakan akhir-akhir ini belum tentu sesuai dengan Islam, misalnya dengan melakukan penyerangan “ bom bunuh diri” dan aksi-aksi kekerasan lainnya. Menurut kalangan Islam budaya, aktivitas seperti itu justru mempersempit gerakan dakwah, karena akan membuat dakwah menjadi dicurigai oleh banyak pihak dan mendorong munculnya *Islamphobia*, tindakan mereka jelas merugikan umat Islam dan lebih banyak *mudharatnya*. Al-Washliyah menjalankan proses pengislaman melalui dakwah, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu dalam masa reorganisasi kemasyarakatan politik ini para elitnya terjun kedalam dunia politik untuk meraih kekuasaan agar dengan kekuasaan itu nilai-nilai Islam diperjuangkan menjadi asas terbentuknya undang-undang dan peraturan-peraturan yang sesuai dengan syariah Islam dan kehidupan Islami diharapkan secara perlahan tertata dan kedalam seluruh sistem kehidupan masyarakat.

Hafis (2018) mengatakan bahwa upaya dalam menjadikan Al Wahsliyah menjadi organisasi kemasyarakatan ternama dan memiliki pengaruh tidak lepas dari metode dakwah yang dilakukan oleh aktifis dakwah upaya yang ditempuh kala itu cukup efisien dengan menjangkau kalangan anak muda dengan basis di desa dan di kota. Basis yang menjadi target utama adalah mereka yang hidup di pedalaman/perkampungan sehingga dengan gampang anak muda Al Washliyah yang telah dibekali ilmu pengetahuan yang mumpuni dalam berdakwah berhasil merangkul mereka yang belum memahami betul tentang ilmu agama (Wawancara dengan bapak Hafis selaku pengurus aktif Al Washliyah masa orde baru di Medan). Jadi memang benar pendapat bahwa besarnya organisasi kemasyarakatan Islam Al Washliyah adalah tidak terlepas dari para elit organisasi kemasyarakatan sendiri, salah satunya dengan memberikan kesempatan kepada seluruh kader organisasi kemasyarakatan Al Washliyah untuk masuk ke dalam partai dan ikut bertarung didalam partai untuk mendapatkan kekuasaan politik sehingga ketika menduduki jabatan mereka secara otomatis memperdulikan keberlangsungan umat sebaik mungkin. Berikut pernyataan bapak Ozom: “Ya terus terang pak, memang tidak bisa kita nafikan pak. Kita yang masuk di Al Washliyah ini ada 3 pak, pertama turunan, ya saya dari turunan pak, dari keluarga. Yang kedua, kaderisasi, dan ketiga itu ada yang bertindak sebagai simpatisan. Nah seperti pak warjio ini itu mufakkir, orang pemikir. Bisa mengembangkan Al-Washliyah. Ya jadi betul pak, terus terang saja ada yang memanfaatkan Al-Washliyah ini untuk tunggangan saja, itulah yang harus kita rubah. Itu biasanya masuknya melalui proses kaderisasi. Dari awal dia ikut kaderisasi, tapi seluk beluk Al-Washliyah sebetulnya secara mendalam dia tidak paham. Beginilah kontradiksi selama ini yang kami hadapi didalam. Yang kita

harapkan kedepan, boleh kalian kemana mana, begitu bicara tentang Al-Washliyah, Al Wasliyah yang di nomorsatukan. Nah ini yang belum ada. Kita ini dari berbagai partai dari berbagai latar belakang, silahkan, namun ideologinya harus Al-Washliyah.

Selanjutnya Al Washliyah juga melakukan cara lain dalam memainkan strategi politik pembangunan dengan Upaya dakwah dan proses pengIslaman juga diharapkan akan memberikan kesadaran tidak hanya bagi umat Muslim. Namun juga kalangan non-muslim, terutamanya agar mereka memahami bahwa nilai-nilai Islam itu tidak menghendaki upaya-upaya pemaksaan dan penindasan terhadap kalangan minoritas non-Muslim. Untuk sementara ini kalangan non-Muslim sangat mencurigai jika Islam secara formal mampu ditegakkan sehingga kehidupan mereka akan terancam, karena dalam pikirannya Islam itu sama dengan ancaman, ketidakadilan, intimidasi, kekerasan dan teror, seperti yang dilakukan kelompok-kelompok kecil kalangan Islam fundamentalis. Oleh karena itu, ketika upaya pengIslaman dilakukan, terutamanya sejak tahun 1970an, yang ditandai oleh banyaknya sarjana santri mulai berperanan di dalam birokrasi pemerintahan, diikuti dengan desakan pemerintah untuk melarang judi, melegalkan pemakaian jilbab, mendirikan perbankan islam, tidak jarang menimbulkan kecurigaan dan ketegangan dalam kalangan non-Muslim. Keadaan ini menuntut upaya dakwah yang lebih intensif. Seharusnya melalui dakwah dapat diyakinkan bahwa jika sistem kehidupan itu dilakukan dengan asas dan cara-cara Islam, maka sudah pasti akan memberikan manfaat yang besar tidak hanya untuk kalangan Muslim saja, melainkan pihak non-Muslim akan juga ikut menikmatinya, selari dengan Islam sebagai "*rahmatan lil alamin*".

Sikap dan taat kepada penguasa walaupun pemerintahannya tidak berdasarkan Islam, asalkan mereka masih beragamn Islam dan menjalankan pemerintahan yang tidak menyimpang daripada Islam atau masih dalam keadaan yang menghargai prinsip-prinsip pemerintahan Islam seperti keadilan, musyawarah, kejujuran, kebenaran dan sebagainya. Namun sikap itu bukan berarti mereka tidak kritis, jika pemerintahan menunjukkan sikap yang menyeleweng daripada prinsip-prinsip itu mereka akan mengingatkan para penguasa dan menjalankan kewajiban *ammar ma'ruf nahi munkar*. Persoalannya adalah apakah sikap mereka untuk ikut hidup dalam pemerintahan yang tidak berasaskan syariah Islam itu tidak melanggar syariah? Apalagi secara perseorangan atau secara tidak langsung Al-Washliyah terlibat dalam pemerintahan, dan bahkan pada saat ini ikut dalam proses demokratisasi. Para elit pergerakan Islam bahkan menjadi kalangan yang terlibat dalam mendirikan partai, bahkan yang tidak berasaskan Islam, serta membawa banyak para ahli mereka menjadi pengerusinya.

Keadaan itu terjadi karena boleh jadi mereka tidak memahami syariah atau karena tidak memiliki pilihan lain, di antara pilihan yang buruk yang dilakukan para elit pergerakan Islam, maka pilihan seperti itulah yang terbaik, dengan harapan bahwa dalam aktivitiya tetap menjunjung nilai-nilai, doktrin dan ajaran Islam. Jawaban yang berbeda diberikan oleh seorang ahli tafsir yang terkenal di Sumatera Utara yang berpendapat bahwa aktivitas politik dan pemerintahan itu termasuk kedalam kategori *muammalah*, sehinggalah tidak memiliki aturan secara khusus (*khassah*), melainkan diatur secara umum (*ammah*). Oleh karena itu, sepanjang aktivitas politik dan pemerintahan itu tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, maka aktivitas tersebut tetap sah atau diperbolehkan. Pada umumnya pendapat yang terakhir inilah

yang banyak dianut oleh kalangan Muslim di Indonesia.

Pertimbangan antara syariah dan strategi pencapaiannya menjadi sesuatu yang penting dilakukan agar pemerintahan yang belum Islami tidak menghambat atau mempersulit upaya dakwah kemasyarakatan. Sangat sulit melakukan dakwah dalam suasana pemerintahan yang Islamphobia, seperti pada masa Orde Baru. Untuk menyampaikan Khutbah Jum'at saja para khatibnya harus memperoleh persetujuan pemerintah dan isi khutbahnya diawasi. Begitu berbahayanya upaya untuk menyampaikan kebenaran, sehingga mereka harus menghadapi kekuasaan yang sewaktu-waktu akan menangkap mereka, memenjarakan dan bahkan menyiksa tanpa alasan yang jelas. Strategi Islam budaya telah menghasilkan kerja-kerja penting untuk mengembangkan syiar Islam dan membangun citra Islam yang baik dan bermanfaat untuk umat.

Para elit Al-Washliyah tidak menolak pendapat tentang pentingnya pemerintahan, namun sebagian gerakan dakwah kemasyarakatan *amar ma'ruf nahi munkar* mereka dalam kedudukan untuk membina masyarakat, sedangkan perjuangan politik diserahkan kepada partai-partai. Namun ketika keterlibatan masyarakat Muslim, khususnya para ahli atau elit masyarakat sipil berteraskan Islam dalam partai dianggap kalangan Islam fundamentalis sebagai *bid'ah* atau bahkan *syubhat*, para elit Al-Washliyah menolak pendapat tersebut dengan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *kullu bid'atin dhalalah* (setiap *bid'ah* sesat) adalah perbuatan baru yang masuk dalam perkara aqidah dan ritual ibadah maghdhoh yang sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an maupun as-Sunnah, sedangkan perbuatan baru di bidang *mu'ammalah* bukanlah *bid'ah*. Partai, sepak bola, menunggang kereta dan sebagainya memang tidak ada pada era Rasulullah s.a.w., tetapi bukan berarti dilarang atau

perbuatan sesat, karena memang sifatnya *muammalah*.

Pemikiran-pemikiran seperti ini telah membawa elit-elit daripada Al-Washliyah memiliki pedoman untuk terlibat dalam aktivitas politik. Sehingga ketika memasuki era reformasi, organisasi kemasyarakatan mereka tidak ragu-ragu untuk mendukung proses demokratisasi.

Periode 1956-1958 yang di pimpin oleh Arsyad Thalib Lubis menjalankan politik dalam pembangunan Al Washliyah dengan beberapa langkah yakni membuat kursus kader dakwah untuk melawan kristenisasi kursus tersebut di pelopori oleh para alim ulama Al Washliyah. Sejak 1960, Arsyad Thalib Lubis membuka kelas kuliah perbandingan agama antara islam dan kristen di kantor pengurus besar Al Washliyah. Untuk kaderisasi majelis kader pengurus besar Al Washliyah dengan pimpinan HIMMAH melaksanakan training secara bertahap gelombang I yang di ikuti oleh para elit Al Washliyah dan gelombang II menyusun lembaga dakwah HIMMAH dengan sistem peta dakwah. Para kader HIMMAH tersebut terus merambah ke pelosok daerah sumatera utara untuk melaksanakan misi dakwah Islamiyah. Dakwah tersebut dimulai di daerah Deli Serdang yang mencakup wilayah Kecamatan Patumbak, Pancurbatu, Kecamatan Sibolangit, Kecamatan Tanjung Muda Hilir, Kecamatan Namo Rambe. Misi dakwah tersebut terus berlangsung hingga tahun 1970-an.

Al Washliyah menyakini bahwa perubahan yang terjadi didalam PB. Al Washliyah dilakukan sebagai bentuk transfororganisasi kemasyarakatan dakwah dengan sosial. Dalam konteks politik pembangunan Al Washliyah memiliki strategi dan konsep dan kontruksi untuk tetap mampu bertahan hingga sampai saat sekarang ini. Salah satunya adalah: menguatkan basis dalam bidang pendidikan, dakwah, amal sosial, dan ekonomi, dan semuanya (idealnya)

diarahkan kepada cita-cita Islam dan cita-cita tradisi Sunni.

### **Analisis Model Politik Pembangunan Organisasi kemasyarakatan Islam Muhammadiyah Dan Al Washliyah Kota Medan.**

Organisasi kemasyarakatan Islam Muhammadiyah dan Al Washliyah Kota Medan dalam implementasinya merupakan masyarakat sipil yang berbasiskan ajaran Islam dengan pemahaman yang masing-masing berbeda. Hal ini dapat dilihat terhadap praktek kehidupan yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam Muhammadiyah dan Al-Washliyah.

Muhammadiyah bermula berkembang dari kalangan kelas menengah, seperti pedagang dan kalangan cendekiawan, bukan dari kalangan masyarakat bawah sehingga dengan mudah melakukan mobilisasi modal usaha, mereka dapat membiayai berbagai program pemberdayaan masyarakat melalui upaya mendirikan berbagai lembaga pendidikan, pengembangan organisasi, amal usaha, rumah untuk mengurus anak yatim piatu dan orang tua, klinik kesehatan, bahkan rumah sakit dan sebagainya, selain itu juga melakukan ijtihad ekonomi iaitu dengan mengembangkan usaha-usaha ekonomi seperti usaha percetakan, penerbitan, kerajinan, makanan, koperasi, baitul mal wattanwil, Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) Syariah dan sebagainya (Syarifuddin Jurdi, Nasiwan, Irwan Mawardi dan Bachtiar Dwi Kurniawan, eds, 2010).

Konsep Model Politik pembangunan organisasi kemasyarakatan Islam Muhammadiyah Kota Medan didorong oleh Ideologi Gerakan Islam Pembaharuan secara kultural. Landasannya bahwa Muhammadiyah bukanlah Ideologi sebagaimana Ideologi dalam pengertian sistem paham yang radikal, kaku, dan bercorak gerakan politik. Muhammadiyah kendati bukan Ideologi, tetapi dalam

perkembangannya banyak mengalami persentuhan dengan konsep-konsep dan kepentingan ideologis. Muhammadiyah banyak diperbincangkan masalah-masalah yang berkaitan dengan "Ideologi Islam", seperti konsep Islam sebagai dasar Negara, masyarakat Islam, asas Islam dan konsep-konsep politik Islam.

Dalam pemikiran ideologis, M. Djindar Tamimi mencatat bahwa: "pada Mukhtar ke 37 1968 di Yogyakarta telah diterima ide untuk mengadakan tajdid dalam Muhammadiyah bidang: Ideologi (keyakinan dan cita-cita hidup), Khittah Perjuangan, Gerak dan Amal usaha serta organisasi, dengan rumusan-rumusannya lebih dikonkritkan dan disistematisir dalam Tanwir sesudah itu, seperti rumusan Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah dan Khittah Muhammadiyah."

Pada waktu itu (1968) memang istilah Ideologi mulai dihindari, sehingga Muhammadiyah memakai Istilah "Keyakinan dan Cita-cita Hidup" untuk konsep Ideologi. Hal ini untuk menghindari kesamaan dengan Ideologi Negara, Pancasila. Semua itu menunjukkan bahwa Muhammadiyah betapapun tidak menjadi sistem Ideologi, tetapi tidak tertutup dari pengaruh pemikiran ideologis dan sampai batas tertentu mengadopsi elemen-elemen Ideologi gerakan Islam.

Ideologi Gerakan Muhammadiyah dapat dipahami dalam beberapa dimensi dan esensi pemikiran serta aksi gerakan sebagai berikut: 1) Ideologi gerakan Muhammadiyah merupakan sistem paham dan teori perjuangan yang dilandasi, dijiwai dan dibingkai serta dimaksudkan untuk mengamalkan Islam dalam seluruh kehidupan umat manusia; 2) Ideologi gerakan Muhammadiyah ialah manhaj (sistem, metode) dakwah Islam untuk mengajak manusia beriman kepada Allah serta amar ma'ruf nahi munkar; 3) Ideologi gerakan Muhammadiyah ialah sistem dan teori perjuangan Islam untuk Tajdid

(pembaruan) sehingga selalu terbuka pada kritik dan memiliki agenda perubahan ke arah kemajuan; 4) Ideologi gerakan Muhammadiyah memiliki kerangka pemikiran dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, Khittah Muhammadiyah, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah, dan pemikiran-pemikiran formal lainnya dalam sistem keyakinan dan kehidupan Islami dalam Muhammadiyah; 5) Ideologi gerakan Muhammadiyah merupakan teori dan strategi perjuangan Islam yang menyeluruh dan mencakup seluruh aspek kehidupan untuk mewujudkan Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya; 6) Ideologi gerakan Muhammadiyah merupakan tali pengikat gerakan yang diwujudkan dalam sistem organisasi, jama'ah, kepemimpinan, dan gerakan amal usaha untuk menjadikan Islam sebagai rahmatan lil-'alamin di muka bumi ini.

Dari ideologi yang dimiliki oleh Muhammadiyah terbentuk model yang utuh bahwa sumber politik pembangunan Muhammadiyah kota Medan dilaksanakan atas dasar kekuatan ideologi yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan tersebut. Selanjutnya pergerakan-pergerakan seperti dakwah, pendidikan, sosial dan lainnya dikuatkan dari ideologi itu sendiri.

Sementara Konsep Model Politik Pembangunan organisasi kemasyarakatan Islam Al-Washliyah yang memperoleh dorongan utamanya daripada kalangan masyarakat yang hidup di pedesaan sebenarnya didirikan oleh kalangan pelajar Islam dan ulama. Al-Washliyah didirikan dengan tujuan untuk berdakwah menyebarkan Islam dalam aliran pemikiran tradisional, serta untuk membendung upaya pengkristenan. Mereka pun mendirikan berbagai lembaga pendidikan dari Taman Kanak-kanak hingga peringkat universitas. Selain itu membina panti asuhan untuk mengurus anak yatim piatu, serta orang-orang jompo. Mereka juga mengupayakan berbagai

usaha, seperti usaha percetakan, penerbitan, koperasi, baitul mal wattanwil dan sebagainya, namun usaha ini tidak sebesar dan seluas yang dilakukan Muhammadiyah.

Pada awalnya Al-Washliyah merupakan didirikan dan hanya berkembang di provinsi Sumatera Utara, kemudian mereka berusaha mengembangkannya secara nasional dan memindahkan ke ibu kota dari Medan ke Jakarta (Ahmad Hamim Azizy, 2006:125-154). Organisasi kemasyarakatan ini ternyata dapat berkembang dalam berbagai masa, sejak masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru hingga saat ini dalam era reorganisasi kemasyarakatani. Kedua organisasi kemasyarakatan ini ternyata mampu bertahan dan berkembang dalam tekanan Orde Baru hingga sampai sekarang. Kenyataan ini menimbulkan suatu pertanyaan, tentang upaya mereka untuk tetap dapat hidup dan berkembang dalam membangun masyarakat.

Al-Washliyah seperti juga Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan Islam yang meyakini bahwa melalui gerakan perubahan kultural menjadi suatu model yang paling memungkinkan untuk dijalankan melakukan pengislaman kehidupan masyarakat.

Gerakan kultural yang berbasiskan ajaran-ajaran Islam sebagai basis Ideologis dengan strategi dakwah ternyata lebih efektif dalam mengembangkan kebudayaan Islam daripada gerakan-gerakan Islam formal yang mensyaratkan adanya Negara Islam dalam melakukan pembangunan Islam. Model politik pembangunan seperti inilah yang ternyata membuat kedua organisasi kemasyarakatan tersebut mampu bertahan dalam berbagai masa dan berbagai tantangannya.

## **SIMPULAN**

Muhammadiyah dan Al Washliyah merupakan organisasi besar di Kota

Medan yang memiliki beberapa gugusan organ kecil dalam pengembangan organisasi. Muhammadiyah sendiri mengakui bahwa dengan adanya kehadiran organisasi sayap ini dapat menumbuhkembangkan pembangunan masyarakat khususnya dalam upaya pengislaman kehidupan masyarakat Kota Medan. Ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi basis ideologis yang penting dalam kedua organisasi kemasyarakatan tersebut, dengan basis ideologis tersebut maka arah atau orientasi pembangunan atau politik pembangunan kedua organisasi kemasyarakatan tersebut dijalankan. Basis ideologis tersebut berupa surah-surah atau ayat-ayat yang dipentingkan bagi masing-masing organisasi kemasyarakatan dengan cara pemahaman dan penafsiran yang berbeda bagi keduanya, sehingga memberi ciri yang khas dan berbeda bagi kedua organisasi kemasyarakatan tersebut, sekaligus menjadi arah dan orientasi politik pembangunan, serta menentukan strategi pencapaian upaya-upaya pembangunan mereka yang berupa upaya pengislaman seluruh aspek kehidupan masyarakat secara kultural melalui strategi dakwah. Sebagai gerakan kultural melalui strategi dakwah maka, kedua organisasi kemasyarakatan ini membuka kesempatan yang luas agar pengurusnya dapat berkiprah atau mengabdikan diri di berbagai organisasi lain, di institusi kepartaian, pemerintahan, atau menjadi pengusaha-pengusaha ternama, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya, menjadi actor-aktor pembangunan Islam yang berkiprah seperti di partai, birokrasi, dan berbagai tempat lainnya dengan syarat tetap pada komitmen terhadap basis ideologis yang ditanamkan oleh kedua organisasi kemasyarakatan tersebut. Hubungan ideologis ini sangatlah penting dalam strategi dan model politik pembangunan kedua organisasi kemasyarakatan ini, sebab keterlepasan

secara ideologis tidak hanya merusakkan citra dan kehidupan para aktor politik pembangunan itu sendiri, namun juga akan berimbas kepada citra organisasi induknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, D. & Robinson, A. (t.th.) *The Origin of Power, Prosperity and Poverty*. New York: Crown Bussines.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Badawi, A.A. (2006). *Islam Hadari: A model Approach for Development and Progress*. Petaling Jaya: MPH Publishing.
- Death, C. (2010). *Governing Sustainable Development: Parthnership, Protest and Power*. Oxford: Routledge.
- Damami, M. (2000). *Akar Gerakan Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru).
- Gasper, D. (2004). *The of Development: from economic to human Development*.Edinburg: Edinburg University Press
- Hambali, H. (2006). *Ideologi Dan Strategi Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah).
- Jurdi, S. (2010). *Muhammadiyah Dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Kusmanto, H, (2013). *Islamic Based of Civil Society: Political Accomodation and the Role of Democratizations in North Sumatera*. (Disertasi, USM)
- Nasih, M. (2000). *Evolusi gagasan politik Muhammadiyah dari negara Islam ke Negara bangsa (1945-2000)*, UI: Perpustakaan Universitas Indonesia (Tesis)
- Moleong, L.J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya
- Nashir, H. (2006). *Dinamika Politik Muhammadiyah*,(Malang: Umm Press),
- Organsky, A.F.K. (1985). *Tahap-Tahap Perkembangan Politik*. Akademika Pressindo: T.P
- Suwarno, (2002). *Muhammadiyah Sebagai Oposisi*, (Yogyakarta: UII Press),
- Syaifulallah, (1997). *Gerak Politik Muhammadiyah Dalam Masyumi*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Salleh, M.S. (2003). *Pembangunan Berteraskan Islam*. Kuala Lumpur: Utusan Publication.
- Tjokrominoto, M. (2007). *Pembangunan: Dilema Dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Warjio, (2013). *Dilema Politik Pembangunan PKS Islam dan Konvensional*, Medan: Perdana Publishing.

Warjio, (2013). *Politik Pembangunan Islam Pemikiran dan Implementasi*, Medan: Perdana Publishing.

Warjio, (2016). *Politik Pembangunan: Paradoks, Teori, Aktor dan Ideologi*, Jakarta: Kencana.